

**Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap**

# Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(01), 2023, p.1-10

|  |
| --- |
| **ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI, DAN**  **AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KECAMATAN KARTASURA**  **(Studi Kasus pada Aparatur Desa di Kecamatan Kartasura)**    **Rizky Diah Fitriani(1), Dr. Suprihati, SE., MM(2), Maya Widyana Dewi., SE., MM(3)**  Jurusan Akuntansi, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Jl. Slamet Riyadi 361, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161 Email: rizkydiahh@gmail.com |

***Abstrak***

*The purpose of this study was to determine the effect of effectiveness, transparency and accountability on the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Kartasura District. The methodology used in this study is a method of quantitative data analysis and testing is carried out using a multiple regression model. The population used in this study were 105 village officials in Kartasura District. In this study, a sample of 95 people was obtained. With a significance value of 0.016 less than α = 0.05, this indicates that the effectiveness variable has a significant effect on the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). A significant value of 0.018 is less than α = 0.05. This indicates that the transparency variable has a significant effect on the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). With a significance value of 0.002 less than α = 0.05, this indicates that the accountability variable has a significant effect on the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). Based on the results of testing the data obtained Fcount of 39.486 greater than Ftable of 2.70 with a significance of 0.000 which is smaller than the significant value α = 0.05 so it can be concluded that simultaneously or together the variables of effectiveness, transparency and accountability are factors that influence variable Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes).*

***Keywords:*** *effectiveness, transparency, accountability, APBDes*

## 1. *.*PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini tingkat kejujuran itu sangat di perlukan atau bahkan berpengaruh untuk menentukan kemana arah negara melaju, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju dan yang terakhir tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang desa salah satunya yaitu Undang-undang N0. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Terdapat beberapa sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang masuk ke dalam kas desa yang nantinya akan menjadi keuangan desa yang dapat digunakan untuk mengelola dan melakukan pembiayaan program maupun kegiatan yang dilakukan di desa. Sumber pendapatan desa yang sah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang meliputi usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah, 2. Transfer yang meliputi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten atau kota, dan 3. Pendapatan lainnya yang meliputi hibah dan atau sumbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber-sumber pendapatan desa yang telah diterima tersebut selanjutnya akan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya yang apabila disetujui akan menjadi peraturan desa yang kemudian diserahkan ke Bupati melalui camat. Besaran Anggaran yang diterima dalam APBDes setiap desa di Indonesia tentunya berbeda tergantung beberapa aspek pendapatan desa yang dimiliki oleh setiap desa. Pengelolaan APBdes ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun meskipun pengelolaan Dana Desa ini telah diatur sedemikian rapih, tetap saja ada beberapa kemungkinan-kemungkinan dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan tuntutan dan arahan dari pemerintah pusat. Karena dalam beberapa kasus terakhir, terjadi penyelewengan dana desa oleh aparat desa. Terbukti saat ini beberapa aparat desa terseret ke pengadilan tipikor, yang mana masalahnya mungkin bukan karena korupsi akan tetapi pengelolaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Penulis tertarik untuk meneliti Desa di seluruh Kecamatan Kartasura terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kartasura Karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan APBDes di Kecamatan Kartasura. Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya.

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini, diantaranya: Penelitian oleh Kusuma et.al (2019) memperlihatkan hasil bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian oleh Tangahu et.al memperlihatkan hasil bahwa Transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Anggaan Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian oleh Rahmayani dan Kurnadi (2022) memperlihatkan hasil bahwa Transparansi dan Akuntabilitas memiliki efek signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Artinya semakin transparan dan akuntabel pengelolaan APBDes, maka semakin baik pengelolaan APBDes nantinya,

Menurut uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan judul “Analisis Pengaruh Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kartasura”.

## 1. LANDASAN TEORI

## Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan output dan tujuan atau dapat juga dikatakan adalah ukuran seberapa jauh tingkau output, kebijakan dan prosedure dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang adalah sasaran yang telah ditentukan (Pekei, 2016).

Efektivitas adalah ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Sebuah kegiatan atau program dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut : Adanya tujuan yang jelas, Struktur organisasi, Adanya dukungan ataupun partisipasi masyarakat dan Adanya sistem nilai yang dianut.

## Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat didefinisikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu : Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah desa (Mardiasmo, 2016).

Transparansi dapat didefinisikan sebagai suatu yang jelas dan nyata, dengan demikian transparansi pengelolaan keuangan dana desa berati prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan.

Prinsip transparansi pemerintah paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut : a) Adanya sistem keterbukaan dan standardisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses penyelenggaraan pemerintahan. b) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses dalam penyelenggaraan pemerintah. c) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Lauranti, 2018).

## Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan saran-saran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah).

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (1) yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah penanggungjawaban penyelenggara suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintah.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan progam pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011). APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik *(good governance).* Oleh seba itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau bisa disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa dalam menyusun APBDes harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-undang No 16 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (undang-undang 2014). Musyawarah yang dilakukan desa seperti yang terdapat dalam pasal 54 ayat 1 merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

APBDes pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, APBDes terdiri dari : Pendapatan desa, Belanja desa, dan Pembiayaan desa.

## Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Perumusan Hipotesis



**Gambar 2 Kerangka Pemikiran Teoritis**

## Pengaruh Efektivitas terhadap Pengelolaan APBDes

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017). Apabila efektivitas meningkat maka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan meningkat.

H0 : Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

H1 : Efektivitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan APBDes**

Transparansi adalah menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkap faktor-faktor yang sifatnya material secara bertahap kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Hanifah, 2015). Apabila Akuntabilitas desa meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka akan meningkat.

H0 : Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan APBDes**

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Indrianasari, 2017). Apabila desa meningkatkan Akuntabilitas maka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan meningkat.

H0  : akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

H3  : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini responden terdiri dari : Aparatur Desa di kecamatan (Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan) dengan jumlah total responden 105. Sedangkan metode pengumpulan sampel yang digunakan penelitian menggunakan non proporsional sampling atau sampel berimbang, dan sampel yang diperoleh sebanyak 95 responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan secara *offline*.” Adapun skala yang digunakan untuk mengukur jawaban dari responden dalam penelitian ini, yaitu skala interval (*agree-disagree scale*) dengan nilai atau bobot penilaian antara angka 1-5. Nilai 1 menunjukkan tanggapan sangat tidak setuju sedangkan nilai 5 menunjukkan tanggapan setuju dengan pernyataan yang disajikan.

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Terdapat beberapa tahapan pengujian dalam melakukan analisis regresi linear berganda, yaitu: Uji Reliabilitas, Uji Validitas, dan Uji Asumsi Klasik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1 Karakteristik Responden**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Karakteristik Demografi | Kategori | Frekuensi | Persentase | | 1. | Jenis Kelamin | Pria  Wanita | 75  20 | 79%  21% | | 2. | Usia | 20-30 tahun  31-40 tahun  41-50 tahun  51-60 tahun  >60 tahun | 12  23  26  24  10 | 13%  24%  27%  25%  11% | | 3. | Pendidikan Terakhir | SD  SMP  SMA/SMK  Diploma  Sarjana | 0  0  69  0  26 | 0%  0%  73%  0%  27% | |

Berikut karakteristik responden pada penelitian ini:

Sumber: Data diolah, 2023

## Uji Asumsi Klasik

Pada pengujian asumsi klasik, terdapat beberapa tahan pengujian yang dilakukan yaitu: **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Metode uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah *Monte Carlo Sig.* Nilai yang dihasilkan pada *Monte Carlo Sig* sebesar 0,094 yang dapat dikatakan nilai Monte Carlo Sig 0,094 lebih besar daripada 0,05 maka dapat dikatakan data berditribusi normal.

## 2. Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonierotas menunjukkan nilai VIF semua variabel yang diperoleh dari pengujian memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel pada penelitian ini tidak terindikasi adanya gejala multikolinearitas.

**3. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi pada penelitian kali ini menggunakan uji *Durbin Watson*. Jika hasil nilai *Durbin Watson* berada diantara dU dan 4-dU, maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Nilai *Durbin-Watson (D-W)* sebesar 1,722. Daerah bebas autokorelasi untuk jumlah sampel (n) 95 dan jumlah variabel independen (k) 3 adalah 1.7316. Hal tersebut memperlihatkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi atau telah terbebas dari autokorelasi.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi ini yaitu untuk menguji hubungan serta pengaruh suatu variabel dependen dengan beberapa variabel dalam sebuah penelitian. Berdasarkan hasil analisis ditemukan model persamaan sebagai berikut :

## Y = 10,460 +0,023 E+ 0,139 T+ 0,308 A+ e

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa semua koefisien regresi pada model memiliki arah yang positif.

## Uji Goodness of Fit

1. **Koefisien Determinasi (R2)**

hasil bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,551. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar 55% dan 45% dapat dijelaskan oleh faktor ataupun variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

.

## 2. Uji Statistik F

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2** **Uji**  **Hipotesis**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | | B | Std. Error | Beta | | 1 | (Constant) | 10.460 | 3.450 |  | 3.032 | .003 | | Efektivitas | .023 | .095 | .030 | 3.450 | .016 | | Transparansi | .139 | .105 | .129 | 3.276 | .018 | | Akuntabilitas | .308 | .096 | .315 | 3.213 | .002 | | a. Dependent Variable: APBDes | | | |  |  |  | |

Hasil Uji Statistik F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 39,483 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**3. Pengujian Hipotesis (Uji t)** Uji statistik t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung > t tabel, maka variabel bebas dikatakan mampu mempengaruhi variabel terikat. Selain itu, jika taraf signifikansi yang ditemukan dari perhitingan bernilai kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima.

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil Uji t sebagai berikut:

## Uji Hipotesis 1: Pengaruh Efektivitas (X1) terhadap APBDes (Y)

Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBDes karena nilai t hitung = 3,450 dimana lebih besar dari t tabel = 0,201 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima.

## Uji Hipotesis 2: Pengaruh Transparansi (X2) terhadap APBDes (Y)

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBDes karena nilai t hitung = 3,276 dimana lebih besar dari t tabel = 0,201 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,018 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima.

## Uji Hipotesis 3: Pengaruh Akuntabilitas (X3) terhadap APBDes (Y)

Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian karena nilai t hitung = 3,213 dimana lebih besar dari t tabel = 0,201 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Kartasura. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisi regresi linear berganda dan menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji ketepatan terhadap model regresi yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada uji F secara simultan diketahui bahwa nilai f sebesar 39,483 dan untuk nilai Sig. 0,000, maka dapat diketahui bahwa model regresi berganda layak digunakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan antara variabel efektivitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima.
2. Variabel Efektivitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 sehingga H1 diterima. Artinya Efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Variabel Transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05 sehingga H2 diterima. Artinya Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 sehingga H3 diterima. Artinya Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
5. Hasil uji determinasi dinyatakan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,551 atau 55%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk variabel efektivitas, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh sebesar 55% terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kelurahan se Kecamatan Kartasura.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak memperlihatkan keadaan sesungguhnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

## Saran

Berdasarkan pada keterbasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Sebaiknya kelurahan di Kecamatan Kartasura tetap mempertahankan prosedur-prosedur ini seperti Efektivits, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena dari penelitian ini seluruh Kelurahan di Kecamatan Kartasura sudah melaksanakan Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen lain karena kemungkinan ada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin akan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel pada penelitian misal pada tingkat kabupaten atau kota.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (n.d.). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. BP Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Trussmedia Grafika.

Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *4*(8).

Indrianasari, N. T. (2017). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, *1*(2).

Kusumaningrum, P. D., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA JENALAS KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *15*(4). https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3743

Lauranti, M., Afrina, E., & Mawesti, D. (2018). *Mengkaji Penggunaan eGovernment Pemerintah Daerah di Indonesia*. Perkumpulan Prakarsa.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YPKN.

Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Andy.

Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Andi.

Munawaroh, I. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo*. UNIVERITAS JAMBI.

Nugraha, A. (2019). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA DESA TRANTANG SAKTI KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2016 2018*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, *1*(2). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062

Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi* (1st ed.). Taushia.

Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, *3*(2), 703–713. https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i2.2984

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL EKSEKUTIF*, *1*(1).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* (2nd ed.). Read.

Supit, J. L., Nangoi, G. B., & Budiarso, N. S. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA LOWIAN KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, *12*(2). https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18288.2017

Tangahu, W. S., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2020). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Hirarki : Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* , *2*(2).

Wulandari, I. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso.* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember